



TANTANGAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT LOKAL DI KAWASAN TIGA GILI LOMBOK UTARA

Yuliatin^{1)*}, Sawaludin²⁾, Basariah³⁾, Isma Nova Liana⁴⁾

¹²³⁴Universitas Mataram

E-mail: yuliatin.fkip@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis tantangan pemenuhan hak pendidikan bagi masyarakat lokal di kawasan Tiga Gili, Kabupaten Lombok Utara, yang berada di tengah perkembangan pesat industri pariwisata. Meskipun sektor pariwisata memberikan peluang ekonomi yang signifikan, berbagai kelompok masyarakat lokal masih menghadapi hambatan dalam memperoleh akses, partisipasi, dan keberlanjutan pendidikan yang berkualitas. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan masyarakat, orang tua, pendidik, dan pemangku kepentingan terkait, observasi lapangan, serta studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama pemenuhan hak pendidikan meliputi keterbatasan akses pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Tinggi, orientasi kerja jangka pendek di sektor wisata, serta belum optimalnya sinergi antara pemerintah, sekolah, dan pelaku industri pariwisata. Temuan ini sejalan dengan berbagai studi yang menegaskan bahwa kawasan pariwisata sering menghadapi paradoks antara pertumbuhan ekonomi dan investasi pendidikan jangka panjang. Selain itu, kesenjangan infrastruktur pendidikan dan terbatasnya program pendidikan berbasis kebutuhan lokal turut mempengaruhi tingkat partisipasi pendidikan masyarakat. Penelitian menyimpulkan bahwa pemenuhan hak pendidikan di kawasan Tiga Gili memerlukan pendekatan kolaboratif yang mengintegrasikan kebijakan pendidikan, perlindungan sosial, dan tanggung jawab sektor pariwisata. Direkomendasikan penguatan program beasiswa, pendidikan vokasional yang relevan dengan kebutuhan lokal, serta kemitraan berkelanjutan antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan pelaku usaha pariwisata guna menjamin pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat lokal.

Kata kunci: Hak pendidikan; masyarakat lokal; kawasan wisata; Tiga Gili; SDG 4 Pendidikan Berkualitas

ABSTRACT

This study aims to analyze the challenges of fulfilling the right to education for local communities in the Three Gili area, North Lombok Regency, amid the rapid development of the tourism industry. Although the tourism sector has generated significant economic opportunities, various groups within the local community continue to face barriers in accessing, participating in, and sustaining quality education. This research employed a qualitative approach using a case study design. Data were collected through in-depth interviews with community members, parents, educators, and relevant stakeholders, complemented by field observations and document analysis. Data were analyzed through the processes of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that the primary challenges in fulfilling the right to education include limited access to upper secondary and higher education, the prevalence of short-term employment orientations within the tourism sector, and the lack of optimal synergy among government institutions, schools, and tourism industry stakeholders. These findings are consistent with previous studies indicating that tourism destinations often experience a paradox between economic growth and long-term investment in education. Furthermore, disparities in educational infrastructure and the limited availability of educational programs tailored to local



needs have also contributed to lower levels of educational participation among local residents. The study concludes that fulfilling the right to education in the Three Gili area requires a collaborative approach that integrates educational policies, social protection measures, and the social responsibility of the tourism sector. It is recommended that scholarship programs be strengthened, vocational education be aligned with local development needs, and sustainable partnerships be established among local governments, educational institutions, and tourism businesses to ensure inclusive and sustainable educational opportunities for local communities.

Keywords: *Right to Education; Local Communities; Tourism Area; Three Gili Islands; SDG 4 Quality Education*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam berbagai instrumen hukum internasional maupun nasional. Hak atas pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai akses terhadap layanan sekolah, tetapi juga mencakup kesempatan yang setara bagi setiap individu untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pendidikan menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kapasitas manusia, memperkuat mobilitas sosial, dan mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi. Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya tujuan keempat, menegaskan pentingnya pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

Meskipun berbagai kebijakan telah dirumuskan untuk menjamin pemenuhan hak pendidikan, realitas di berbagai kawasan pariwisata menunjukkan adanya tantangan yang kompleks. Pertumbuhan sektor pariwisata sering kali menghasilkan peningkatan ekonomi lokal, tetapi pada saat yang sama dapat memunculkan kesenjangan akses terhadap layanan sosial dasar, termasuk pendidikan. Fenomena tersebut terlihat di kawasan Tiga Gili Kabupaten Lombok Utara yang meliputi Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan. Sebagai destinasi wisata internasional, kawasan ini mengalami transformasi sosial-ekonomi yang sangat cepat akibat tingginya arus investasi, mobilitas penduduk, dan perkembangan industri pariwisata. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perkembangan pariwisata di kawasan Tiga Gili telah membawa perubahan signifikan terhadap struktur ekonomi masyarakat lokal, pola mata pencaharian, serta dinamika sosial budaya masyarakat setempat. Namun, perubahan tersebut juga menghadirkan berbagai persoalan terkait pemerataan manfaat pembangunan dan kualitas sumber daya manusia lokal.

Kajian terdahulu mengenai kawasan Tiga Gili umumnya berfokus pada isu pembangunan pariwisata berkelanjutan, pengelolaan lingkungan, infrastruktur kawasan, dan dampak ekonomi pariwisata terhadap masyarakat lokal. Penelitian Sutanto (2020) menemukan adanya dilema antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pembangunan pariwisata Tiga Gili yang berdampak pada munculnya ketimpangan sosial di masyarakat. Sementara itu, penelitian Aprilina (2022) mengidentifikasi berbagai persoalan kawasan, seperti keterbatasan infrastruktur dasar, sanitasi, dan kualitas permukiman masyarakat yang berpotensi mempengaruhi kualitas hidup penduduk lokal.

Di tingkat nasional maupun internasional, penelitian tentang pendidikan di kawasan wisata lebih banyak menyoroiti hubungan antara pendidikan dan kebutuhan pasar kerja pariwisata, pengembangan kompetensi tenaga kerja, serta pendidikan vokasional berbasis industri. Namun, masih sangat terbatas penelitian yang secara khusus menelaah pendidikan sebagai hak dasar masyarakat lokal yang hidup di kawasan destinasi wisata internasional.



Padahal, percepatan pembangunan pariwisata sering kali menciptakan paradoks: meningkatnya peluang ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan meningkatnya akses pendidikan masyarakat setempat. Sebagian keluarga lebih memilih melibatkan anak dalam aktivitas ekonomi pariwisata karena memberikan pendapatan yang lebih cepat dibandingkan investasi pendidikan jangka panjang. Fenomena ini berpotensi memperkuat siklus ketimpangan pendidikan antar generasi.

Berdasarkan telaah literatur tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang penting untuk dikaji. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak mengkaji dampak pembangunan pariwisata terhadap ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya masyarakat Tiga Gili, sedangkan kajian mengenai tantangan pemenuhan hak pendidikan masyarakat lokal sebagai kelompok yang terdampak langsung oleh perkembangan industri pariwisata masih relatif minim. Selain itu, sebagian besar penelitian memandang pendidikan sebagai instrumen peningkatan keterampilan kerja, bukan sebagai hak konstitusional yang harus dipenuhi oleh negara, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan pembangunan kawasan wisata.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, artikel ini menawarkan perspektif baru dengan menempatkan pendidikan sebagai isu hak asasi dan keadilan sosial dalam konteks kawasan wisata internasional. State of the art penelitian ini terletak pada analisis hubungan antara transformasi kawasan wisata, kondisi sosial-ekonomi masyarakat lokal, dan tantangan pemenuhan hak pendidikan. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi hambatan akses pendidikan, tetapi juga mengungkap bagaimana struktur ekonomi pariwisata, karakter geografis kepulauan, orientasi kerja masyarakat, serta kebijakan pembangunan daerah mempengaruhi realisasi hak pendidikan masyarakat lokal di kawasan Tiga Gili.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pengembangan pendekatan hak pendidikan (*right-based approach*) dalam menganalisis dinamika pendidikan masyarakat lokal di destinasi wisata internasional. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi yang lebih komprehensif terhadap berbagai faktor struktural, kultural, dan kebijakan yang memengaruhi pemenuhan hak pendidikan, sekaligus memperluas diskursus mengenai pembangunan pariwisata yang inklusif dan berkeadilan sosial. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan studi hak pendidikan di kawasan pariwisata serta menjadi dasar perumusan kebijakan pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal di Kabupaten Lombok Utara.

Urgensi penelitian ini semakin penting mengingat pesatnya perkembangan industri pariwisata Tiga Gili yang terus mendorong peningkatan kebutuhan tenaga kerja dan kualitas sumber daya manusia lokal. Data ketenagakerjaan menunjukkan bahwa sektor pariwisata di kawasan ini terus berkembang, namun sebagian besar masyarakat lokal masih berada pada kategori tenaga kerja berkeahlian rendah sehingga berpotensi mengalami marginalisasi dalam persaingan ekonomi wisata yang semakin kompetitif. Oleh karena itu, pemenuhan hak pendidikan bagi masyarakat lokal tidak hanya berkaitan dengan kewajiban negara dalam menjamin hak warga negara, tetapi juga menjadi prasyarat utama bagi terciptanya pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-eksploratif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat lokal dalam memperoleh hak pendidikan di kawasan wisata Tiga Gili Kabupaten Lombok Utara. Lokasi penelitian meliputi tiga pulau

wisata utama di Kabupaten Lombok Utara, yaitu Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan. Informan penelitian ditentukan secara purposive dengan mempertimbangkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap isu pendidikan masyarakat lokal. Informan terdiri atas masyarakat lokal, orang tua peserta didik, siswa, tokoh masyarakat, guru, pengelola sekolah, pelaku usaha pariwisata, serta pejabat pemerintah daerah yang menangani bidang pendidikan dan pariwisata.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman, persepsi, dan hambatan yang dihadapi masyarakat dalam mengakses pendidikan. Observasi digunakan untuk mengamati kondisi lingkungan pendidikan, ketersediaan sarana-prasarana, serta karakteristik sosial-ekonomi masyarakat setempat. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan terhadap berbagai dokumen kebijakan, data statistik pendidikan, laporan pembangunan daerah, dan dokumen lain yang relevan dengan fokus penelitian. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai kelompok informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2020) yang meliputi tiga tahapan, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap kondensasi data, hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi, dikategorikan, dan dikodekan berdasarkan tema-tema penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk matriks, narasi, dan pola hubungan antar-temuan untuk memudahkan proses interpretasi. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan secara induktif melalui identifikasi tema-tema utama yang menjelaskan tantangan pemenuhan hak pendidikan masyarakat lokal di kawasan Tiga Gili. Analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak pengumpulan data hingga penelitian selesai sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika pemenuhan hak pendidikan dalam konteks kawasan wisata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterbatasan Akses dan Layanan Pendidikan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan akses dan layanan pendidikan masih menjadi salah satu tantangan utama dalam pemenuhan hak pendidikan masyarakat lokal di kawasan Tiga Gili Kabupaten Lombok Utara. Hal ini dapat dicermati dari jumlah lembaga pendidikan yang tersedia sebagaimana pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Akses Pendidikan Menurut Jenjang

Jenjang Pendidikan	Ketersediaan di Tiga Gili			Jumlah
	Gili Air	Gili Meno	Gili Trawangan	
SD	1	1	1	3
SMPN Satap 1 Pemenang		0	1	1
SMA/SMK	0	0	0	0
Perguruan Tinggi	0	0	0	0
Jumlah	1	1	2	4

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa fasilitas Sekolah Dasar (SD) tersedia di Tiga Gili, yakni SD Negeri 1 Gili Indah yang berlokasi di Gili Air, SD Negeri 2 Gili Indah yang berlokasi di Gili Trawangan, dan SD Negeri 3 Gili Indah yang berlokasi di Gili Meno. Namun

demikian, akses terhadap fasilitas pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi, tidak dapat diperoleh secara optimal di dalam kawasan Tiga Gili. Masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi umumnya harus menempuh perjalanan ke luar wilayah Gili, yakni ke Pemenang, Tanjung, atau Kota Mataram. Kondisi ini tentunya mengharuskan peserta didik melakukan mobilitas harian menggunakan transportasi laut atau tinggal di luar pulau untuk melanjutkan pendidikan. Hal tersebut tentunya berdampak pada penambahan biaya pendidikan, dan juga meningkatkan kerentanan peserta didik terhadap gangguan cuaca dan keterbatasan jadwal transportasi. Situasi tersebut berpotensi mengurangi keberlanjutan pendidikan peserta didik. Menurut teori akses pendidikan yang dikembangkan oleh UNESCO (2024), akses pendidikan dipengaruhi oleh empat dimensi utama yaitu *availability* (ketersediaan), *accessibility* (keterjangkauan), *acceptability* (keterterimaan), dan *adaptability* (kesesuaian). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi *accessibility* masih menjadi persoalan utama di kawasan Tiga Gili.

Observasi pada sarana transportasi laut menunjukkan bahwa aktivitas penyeberangan menjadi bagian penting dalam kehidupan pendidikan masyarakat. Ketika kondisi cuaca memburuk, gelombang tinggi dan angin kencang sering kali menghambat mobilitas siswa menuju sekolah. Sebagai contoh, pada bulan Februari 2026 terjadi penutupan sementara jalur penyeberangan yang menghubungkan ketiga pulau wisata tersebut dengan Pelabuhan Bangsal sebaagimana pada gambar 1 berikut.



Gambar 1. Suasana pelabuhan Bangsal yang ditutup sementara karena cuaca buruk

Kondisi tersebut membuat peserta didik terpaksa tidak mengikuti kegiatan pembelajaran karena keterbatasan akses transportasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa faktor geografis tidak hanya mempengaruhi akses fisik terhadap sekolah, tetapi juga berdampak pada keberlangsungan proses pembelajaran. Seorang informan yang merupakan orang tua peserta didik menyampaikan "kalau cuaca bagus anak-anak bisa berangkat sekolah seperti biasa, tetapi kalau ombak besar kadang mereka tidak bisa menyeberang sehingga harus izin tidak masuk sekolah".

Temuan tersebut menunjukkan bahwa akses pendidikan di kawasan Tiga Gili tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sekolah, tetapi juga dipengaruhi oleh ketersediaan transportasi yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan. Dalam perspektif hak pendidikan,



kondisi ini mengindikasikan bahwa aspek accessibility (keterjangkauan) masih menjadi persoalan penting yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah daerah.

Temuan penelitian ini sejalan dengan laporan UNESCO yang menegaskan bahwa masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan dan daerah terpencil cenderung menghadapi hambatan pendidikan yang lebih besar dibandingkan masyarakat perkotaan, terutama terkait biaya transportasi, keterbatasan infrastruktur, dan ketersediaan layanan pendidikan lanjutan. Oleh karena itu, peningkatan akses pendidikan di kawasan Tiga Gili memerlukan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada penyediaan sekolah, tetapi juga penguatan sistem transportasi pendidikan, dukungan beasiswa, serta pengembangan layanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan.

Orientasi Kerja Jangka Pendek Di Sektor Wisata

Hasil penelitian menunjukkan bahwa orientasi kerja jangka pendek di sektor pariwisata menjadi salah satu tantangan dalam pemenuhan hak pendidikan bagi masyarakat lokal di kawasan Tiga Gili Kabupaten Lombok Utara. Pesatnya perkembangan industri pariwisata di Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air telah menciptakan berbagai peluang kerja yang dapat diakses tanpa memerlukan kualifikasi pendidikan tinggi. Ketersediaan lapangan pekerjaan sebagai staf hotel, restoran, kafe, operator transportasi wisata, pemandu wisata, penyedia jasa penyelaman, maupun usaha perdagangan memberikan alternatif yang dianggap lebih menguntungkan dibandingkan melanjutkan pendidikan formal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat lokal, banyak remaja memilih memasuki dunia kerja segera setelah menyelesaikan pendidikan menengah, bahkan sebagian mulai bekerja sambil bersekolah. Keputusan tersebut umumnya didorong oleh pertimbangan ekonomi karena pekerjaan di sektor pariwisata mampu memberikan pendapatan yang relatif cepat dibandingkan manfaat pendidikan yang baru dapat dirasakan dalam jangka panjang. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari investasi pendidikan menuju orientasi ekonomi praktis yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan saat ini. Seorang informan dari Gili Trawangan menyatakan “banyak anak muda di sini setelah lulus SMA langsung kerja di hotel atau restoran. Mereka merasa sudah bisa mendapatkan penghasilan sendiri sehingga kuliah dianggap tidak terlalu penting”.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan memperoleh pekerjaan di sektor wisata sering kali menjadi ukuran keberhasilan yang lebih nyata bagi sebagian masyarakat dibandingkan pencapaian pendidikan tinggi. Akibatnya, motivasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi menjadi relatif rendah, terutama pada keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa kebutuhan tenaga kerja pada industri pariwisata cenderung memperkuat fenomena tersebut. Pelaku usaha wisata lebih banyak membutuhkan tenaga operasional yang memiliki keterampilan praktis dan kemampuan komunikasi dasar dibandingkan kualifikasi akademik yang tinggi. Situasi ini menciptakan persepsi di kalangan masyarakat bahwa pendidikan formal tidak selalu menjadi syarat utama untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang layak di kawasan wisata.

Dari perspektif hak pendidikan, kondisi tersebut menunjukkan adanya tantangan sosial dan kultural. Pendidikan dipandang sebagai pilihan, bukan sebagai hak dan kebutuhan strategis untuk meningkatkan kualitas hidup dalam jangka panjang. Padahal, pendidikan memiliki peran penting dalam memperluas peluang kerja, meningkatkan mobilitas sosial, serta memperkuat



kemampuan masyarakat lokal untuk beradaptasi dengan perubahan ekonomi yang terjadi di kawasan wisata.

Temuan ini sejalan dengan teori *Human Capital* yang dikemukakan oleh Theodore Schultz dan Gary Becker (1993) yang menegaskan bahwa pendidikan merupakan bentuk investasi sumber daya manusia yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan produktivitas dalam jangka panjang. Namun, ketika masyarakat lebih menekankan keuntungan ekonomi yang bersifat segera (*short-term economic return*), investasi pendidikan cenderung dipandang kurang menarik dibandingkan peluang kerja yang tersedia saat ini.

Hasil penelitian ini juga memiliki kesesuaian dengan penelitian Suryawardani et al. (2021) yang menemukan bahwa perkembangan destinasi wisata sering mendorong generasi muda memasuki pasar kerja lebih awal karena tersedianya lapangan pekerjaan yang mudah diakses. Penelitian Aina dan Mkhize (2024) di kawasan wisata Afrika Selatan juga menunjukkan bahwa tingginya permintaan tenaga kerja sektor wisata berkontribusi terhadap rendahnya angka transisi pendidikan menengah ke pendidikan tinggi pada komunitas lokal. Temuan serupa memperlihatkan bahwa hubungan antara perkembangan pariwisata dan pendidikan bersifat paradoks; di satu sisi pariwisata meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, tetapi di sisi lain dapat mengurangi motivasi untuk melanjutkan pendidikan formal.

Dalam konteks kawasan Tiga Gili, orientasi kerja jangka pendek berpotensi menimbulkan kerentanan sosial-ekonomi di masa depan. Ketergantungan pada pekerjaan berkeahlian rendah dapat membatasi peluang masyarakat lokal untuk memperoleh posisi strategis dalam industri pariwisata yang semakin kompetitif. Selain itu, perubahan kondisi pasar wisata, krisis ekonomi, bencana alam, maupun penurunan jumlah wisatawan dapat secara langsung mempengaruhi keberlanjutan pendapatan masyarakat yang tidak memiliki bekal pendidikan dan keterampilan yang memadai.

Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa orientasi kerja jangka pendek di sektor wisata merupakan tantangan nyata dalam pemenuhan hak pendidikan masyarakat lokal di kawasan Tiga Gili. Upaya mengatasi tantangan tersebut memerlukan penguatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang, penyediaan program beasiswa bagi masyarakat pulau kecil, pengembangan pendidikan vokasional yang terintegrasi dengan kebutuhan industri pariwisata, serta kebijakan pembangunan pariwisata yang menempatkan pendidikan sebagai bagian integral dari strategi pengembangan sumber daya manusia lokal.

Belum Optimalnya Sinergi Antara Pemerintah, Lembaga Pendidikan, dan Pelaku Pariwisata

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu tantangan dalam pemenuhan hak pendidikan masyarakat lokal di kawasan Tiga Gili Kabupaten Lombok Utara adalah belum optimalnya sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan pelaku industri pariwisata. Ketiga aktor tersebut sejatinya memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia lokal, namun koordinasi dan kolaborasi yang terbangun masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dalam kerangka pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak sekolah dan masyarakat, program pendidikan yang dilaksanakan di kawasan Tiga Gili masih lebih banyak bergantung pada kebijakan sektor pendidikan secara umum dan belum secara khusus dirancang untuk menjawab tantangan pendidikan di kawasan wisata kepulauan. Di sisi lain, pelaku industri pariwisata



cenderung berfokus pada kebutuhan operasional usaha dan penyediaan tenaga kerja, sementara keterlibatan mereka dalam mendukung pendidikan formal masyarakat lokal masih terbatas. Akibatnya, peluang besar yang dimiliki sektor pariwisata untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan belum dimanfaatkan secara optimal. Seorang kepala sekolah menyampaikan,

“Hubungan dengan pelaku usaha wisata sebenarnya ada, tetapi masih sebatas kegiatan tertentu. Belum ada program bersama yang berkelanjutan untuk mendukung pendidikan anak-anak di sini.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kerja sama yang terbangun masih bersifat insidental dan belum berkembang menjadi kemitraan strategis yang mampu memperkuat akses maupun kualitas pendidikan masyarakat lokal. Padahal, keberadaan industri pariwisata yang berkembang pesat dapat menjadi sumber dukungan yang signifikan melalui program beasiswa, bantuan sarana pendidikan, praktik kerja lapangan, pengembangan keterampilan, maupun pendampingan karier bagi peserta didik.

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan kawasan wisata lebih banyak diarahkan pada pengembangan infrastruktur pariwisata, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, dan penguatan investasi. Sementara itu, aspek pendidikan belum sepenuhnya menjadi bagian integral dari strategi pembangunan kawasan. Akibatnya, pengembangan sumber daya manusia lokal sering kali dipahami dalam konteks pelatihan tenaga kerja jangka pendek, bukan sebagai upaya sistematis untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat secara berkelanjutan.

Dari perspektif tata kelola pembangunan, kondisi tersebut mencerminkan belum optimalnya pendekatan *collaborative governance* dalam pengelolaan kawasan wisata. Menurut Ansell dan Gash (2008), keberhasilan penyelesaian masalah publik memerlukan kolaborasi yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan. Dalam konteks Tiga Gili, kolaborasi tersebut masih menghadapi tantangan berupa perbedaan prioritas, keterbatasan komunikasi antaraktor, serta belum adanya forum koordinasi yang secara khusus membahas pengembangan pendidikan masyarakat lokal.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rasoolimanesh et al. (2023) yang menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata berkelanjutan memerlukan keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor pendidikan, agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat lokal. Penelitian lain oleh Hall (2021) juga menegaskan bahwa destinasi wisata yang berhasil mengembangkan sumber daya manusia lokal umumnya memiliki kemitraan yang kuat antara pemerintah, institusi pendidikan, dan dunia usaha.

Belum optimalnya sinergi antarpemangku kepentingan berdampak pada terbatasnya program yang mampu menjembatani kebutuhan pendidikan dengan perkembangan industri pariwisata. Akibatnya, masyarakat lokal belum memperoleh dukungan yang memadai untuk meningkatkan jenjang pendidikan maupun kompetensi yang dibutuhkan dalam persaingan kerja yang semakin kompetitif. Kondisi ini berpotensi menyebabkan masyarakat lokal hanya menempati pekerjaan berkeahlian rendah, sementara posisi strategis dalam industri pariwisata lebih banyak diisi oleh tenaga kerja dari luar daerah yang memiliki kualifikasi pendidikan lebih tinggi.



Oleh karena itu, diperlukan penguatan kemitraan antara pemerintah daerah, sekolah, perguruan tinggi, dan pelaku industri pariwisata melalui program yang terencana dan berkelanjutan. Bentuk sinergi tersebut dapat diwujudkan melalui penyediaan beasiswa pendidikan bagi masyarakat lokal, pengembangan pendidikan vokasional berbasis kebutuhan industri, program magang terstruktur, dukungan sarana pendidikan, serta penyusunan kebijakan pembangunan pariwisata yang menempatkan pendidikan sebagai bagian penting dalam strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan sinergi yang lebih kuat, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen peningkatan kompetensi tenaga kerja, tetapi juga sebagai sarana pemenuhan hak dasar masyarakat lokal dan penguatan pembangunan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan masyarakat lokal di kawasan Tiga Gili Kabupaten Lombok Utara masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat multidimensional, meliputi:

1. Keterbatasan akses pendidikan lanjutan akibat karakteristik geografis kepulauan yang mengharuskan sebagian peserta didik menempuh perjalanan ke luar pulau untuk memperoleh layanan pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi. Kondisi ini meningkatkan biaya pendidikan dan memperbesar risiko putus sekolah.
2. Kuatnya orientasi masyarakat terhadap pekerjaan di sektor pariwisata yang menawarkan pendapatan cepat dibandingkan manfaat pendidikan jangka panjang. Fenomena ini mendorong sebagian generasi muda untuk memasuki dunia kerja lebih awal sehingga partisipasi pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi menjadi relatif rendah.
3. Belum optimalnya dukungan kebijakan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat di kawasan wisata kepulauan. Pembangunan kawasan Tiga Gili masih lebih berorientasi pada penguatan ekonomi dan infrastruktur pariwisata dibandingkan pengembangan akses pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.
4. Masih terbatasnya integrasi antara pembangunan pariwisata dan pembangunan pendidikan. Pendidikan belum sepenuhnya ditempatkan sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kapasitas masyarakat lokal agar mampu berpartisipasi secara lebih kompetitif dan memperoleh manfaat yang adil dari perkembangan industri pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Aina, Y.A., & Mkhize, N. (2024). "Tourism Growth and Educational Challenges among Local Communities." *International Journal of Educational Development*, 104, 102945.
- Aprilina, D., Mutaqin, A., & Suryani, N. (2022), "Analisis Kualitas Permukiman pada Kawasan Pariwisata Tiga Gili Kabupaten Lombok Utara", *Jurnal Handasah*, Vol. 3 No. 1.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Becker, G. S. (1993). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education*. Chicago: University of Chicago Press.
- Hall, C. M. (2021). Tourism and Sustainable Development Goals: Stakeholder Collaboration and Human Resource Development. *Journal of Sustainable Tourism*, 29(6), 879–896.



- Miles, Huberman, and Saldaña (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
- Rasoolimanesh, S. M., Seyfi, S., Hall, C. M., & Hatamifar, P. (2023). Understanding Sustainable Tourism Development and Community Participation. *Journal of Sustainable Tourism*, 31(4), 815–833.
- Schultz, T. W. (1961). “Investment in Human Capital.” *The American Economic Review*, 51(1), 1–17.
- Suryawardani, I.G.A.O., et al. (2021). “Community-Based Tourism and Local Human Resource Development in Tourism Destinations.” *GeoJournal of Tourism and Geosites*, 37(3), 914–922.
- Sutanto, H. (2020), “Dilema Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan di Kawasan Tiga Gili Kabupaten Lombok Utara”, *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, Vol. 15 No. 2.
- UNESCO. (2024). *Global Education Monitoring Report 2024*. Paris: UNESCO Publishing